



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI

UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Saldi Isra**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **423339**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.790.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 403 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 787 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
3. Tanah Seluas 2452 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **250.000.000**

1. MOBIL, Toyota Yaris Minibus Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1FDC CAST WHEEL Tahun 2015, LAINNYA Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **385.120.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **3.500.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **7.532.769.156**

F. HARTA LAINNYA Rp. **500.000.000**

Sub Total Rp. **14.957.889.156**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **14.957.889.156**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.